

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi dinyatakan sebagai salah satunya unit Lembaga ataupun organisasi perekonomian melalui tujuan utamanya adalah untuk mensejahterakan anggotanya dari segi kebutuhan ekonomi. Koperasi memegang peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, khususnya untuk masyarakat ekonomi lemah (Dila dan Sagita 2020). Koperasi berupa pengelolaan dengan demokratis guna memberi pemenuhan kesejahteraan anggotanya yang tidak menggunakan laba atau keuntungan untuk dijadikan sasaran utama yang ingin dicapainya (Betiyohana 2021). Melalui terdapatnya koperasi dengan demikian anggotanya bisa memperoleh cara yang mudah ketika melaksanakan kegiatan transaksi dibidang ekonomi yang disesuaikan bersama jenis dari koperasi itu sendiri, serta turut membantu pembangunan tatanan ekonomi nasional didalam tujuan untuk mencapai perwujudan warga negara yang bisa maju serta adil Makmur yang berdasarkan atas Pancasila (Dila dan Sagita 2020). Sehingga guna pencapaian sasaran tersebut dengan demikian dilakukannya pengelolaan ataupun penanganan yang optimal, maksimal maupun profesional. Menurut (Melyana 2018), penanganan secara professional membutuhkan suatu cara atau system yang bisa memberi pertanggungjawaban secara baik serta berita maupun informasi yang penting dan juga bisa dipercayai ataupun diandalkan, salah satunya usaha itu ialah melalui mengembangkan system informasi melalui dari akuntansi yaitu dari Laporan keuangan.

Pelaporan kinerja keuangan didalam suatu Lembaga atau perkumpulan organisasi sangat penting membantu dalam menunjang kegiatan ataupun kinerja dalam sebuah organisasi atau perkumpulan. Menurut (Sugiono dan Untung 2008) menegaskan bahwasannya laporan keuangan ialah hasil akhir melalui kegiatan akuntansi yang tujuannya adalah guna memberikan berita atau hal yang berkaitan akan keadaan usaha sebagai dari hasil aktivitas operasi. Kemudian pelaporan keuangan koperasi memuat berita atau hal yang meliputi keadaan perubahan, kinerja ataupun letak-letak suatu keuangan koperasi untuk membantu penentuan kebijakan yang secara strategis bagi perkembangan suatu koperasi itu sendiri (Indawatika 2017). Adanya informasi yang terbatas serta pelaporan yang masih begitu lemah yang tidak tersusun secara baik serta tidak berstandar akan berdampak pada koperasi untuk mendapatkan bantuan pendanaan maupun modal melalui pemerintah, maupun mitra yang diajak bekerja sama serta pihak bank (Rizca 2018). Para pengurus koperasi dengan tidak segera dilakukan penuntutan guna mengadakan pelaporan yang sesuai akan aturan maupun kebijakan yang sudah disusun supaya hal tersebut bisa dimengerti bagi pihak internal maupun eksternal (Sabella 2018).

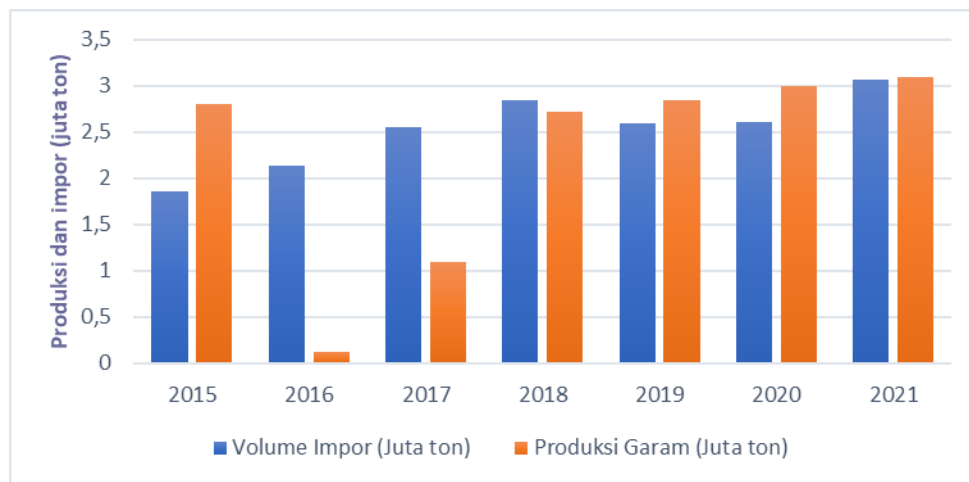
Pembuatan laporan memerlukan acuan supaya pelaporan nantinya bisa dikerjakan sesuai atas aturan maupun acuan yang telah diberlakukan. Sekarang ini, di Indonesia mempunyai 4 standar dari keuangan yakni PSAK yang mempunyai basis IFRS, syariah, selanjutnya Standar Akuntansi Pemerintah serta yang terakhir yakni SAK ETAP (Rizca 2018). Koperasi sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik yang cukup berkembang di Indonesia sewajarnya harus mengetahui dan menerapkan standar yang tepat sebagai acuan dalam pembuatan

laporan keuangan (Irwadi, Dian Ofasari 2021). Sebagaimana yang ditegaskan didalam UU No. 17 tahun 2012 pada pasal 37 ayat (2) menjelaskan bahwasannya pelaporan keuangan yang sebagaimana diartikan dalam ayat (1) huruf c dikerjakan berlandaskan standar atau acuan yang diberlakukan. Standar yang digunakan pada entitas tanpa sebuah akuntabilitas misalnya suatu usaha kecil serta menengah termasuk badan usaha koperasi adalah SAK ETAP (Vebiyanti 2016).

SAK ETAP diterbitkan karena Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menilai bahwa penyusunan berdasarkan PSAK melalui basis IFRS dirasa mempunyai tingkatan kerumitan yang lumayan tinggi sehingga nantinya membuat pengusaha dengan skala yang kecil menjadi kesulitan, yang mana di Indonesia ini sebagian banyak usahanya masih mempunyai skala yang kecil serta menengah (Vebiyanti 2016). SAK ETAP penyusunannya melalui adopsi pada IFRS For SME (*Small Medium Enterprises*) melalui pemodifikasian yang disesuaikan terhadap situasi yang terjadi di Indonesia saat ini serta dikerjakan menjadi lebih ringkas lagi (Ariantini, Zuhri, dan Meitriana 2014). Dalam kebijakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUMKM/IX/2015, mengenai acuan umum akuntansi pada koperasi dipasal 3, dengan demikian tiap koperasi yang tidak mempunyai akuntabilitas public diberikan persyaratan pelaporan keuangan yang berpedoman atas SAK ETAP (Rahmany 2019). Dalam laporan keuangan yang berdasarkan SAK ETAP meliputi neraca, laba rugi ataupun perhitungan atas hasil usahanya, perubahan ekuitas, arus kas serta CALK (Dewi 2017). Melalui terdapatnya SAK ETAP diharap suatu Lembaga menengah serta kecil ataupun koperasi bisa membuat pelaporannya secara mandiri.

Dewasa ini, perkembangan koperasi di Indonesia sangat pesat ditandai dengan kemunculan koperasi yang bergerak dalam bidang pertanian yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen merupakan badan usaha yang melakukan korelasi atau hubungan kerja dengan Lembaga koperasi guna mendapatkan serta melakukan pemasaran produk atau jasa yang aktivitas utamanya ialah melakukan penyediaan, operasi serta melakukan pengelolaan atas fasilitas maupun produksi secara bersama-sama (Rudianto 2010). Salah satu koperasi yang memerlukan pemberdayaan adalah koperasi garam, berdirinya suatu koperasi garam diyakini mampu meningkatkan perekonomian di suatu wilayah. Menurut (Daulay et al. 2019), menyatakan bahwa pasaran komoditi garam dijadikan salah satunya komoditas perniagaan yang begitu relevan atau penting didalam akhir tahun belakangan ini, pernyataan ini berhubungan terhadap fenomena atau isu impor yang terus meningkat membuat resah para petani garam karena kegiatan memproduksi garam di Indonesia kebanyakan ialah produksi garam melalui atau yang dikerjakan oleh masyarakatnya, hal tersebut membutuhkan pemberdayaan dari pemerintah dengan menyarankan suatu kelompok petani garam untuk membentuk koperasi agar mempermudah pemasaran garam lokal. Berlandaskan pendataan melalui kementerian kelautan serta perikanan maka keperluan garam pada beberapa tahun meningkat. Berikut data kebutuhan garam tahun 2015-2021.

Grafik Volume Impor dan produksi Garam 2015-2021

**Gambar 1. 1****Grafik Volume Impor dan produksi Garam 2015-2021**

(Sumber: KKP, BPS, dan Kemenko Marves: <https://lokadata.beritagar.id>)

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kebutuhan garam di Indonesia masih belum terpenuhi secara maksimal, untuk itu pemerintah masih mengimpor garam dari luar negeri. Sekarang ini, kebanyakan produksi dari garam itu sendiri diadakan secara perorangan bagi petani garang, dengan demikian produksinya memiliki hasil yang masih dibawah atau rendah serta kualitas yang juga relative merendah, yang mana hal tersebut tidak melengkapi spesifikasi yang menjadi kriteria bagi industry didalam negeri (Yosephina Margaretha Jawa Batafor 2020).

Provinsi di Indonesia yang berkembang pertanian garam adalah provinsi Bali. Berdirinya koperasi produsen garam bertujuan untuk menyimpan hasil produksi garam petani yang bisa ditampung oleh koperasi dengan standar harga layak (Kusmiati, dan Malinda 2018). Pendirian koperasi garam didukung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster yang dilansir dalam berita (Nusabali 2021) pada tanggal 8 November 2021 yang menyatakan bahwa gubernur Bali akan bentuk koperasi bersama satu pintu koperasi garam, penguatan SDM petani garam dalam

produksinya juga akan dilakukan Dinas Koperasi & UKM dan dinas Perdagangan & Perindustrian, selain itu juga dapat bantuan permodalan dari BPD Bali untuk pembangunan dan pengemasan garam yang lebih baik. Menurut (Utami 2021) dalam *medcom.id* yang menjelaskan bahwa pemerintah itu secara berkala memberi dorongan untuk memperbaiki kualitas garam didalam negeri dengan membentuk sebuah koperasi agar dapat meningkatkan pemasaran garam sebagai tambahan nilai didalam melakukan penjagaan fluktuasinya nilai atau harga garam ditingkatkan petani.

Perkembangan pemasaran garam di Bali saat ini didukung oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, hal tersebut dilansir dalam berita (*Bisnisbali.com n.d.*) pada tanggal 29 september 2021 bahwa, untuk saat ini dalam membantu masalah ekonomi petani garam di Bali dan untuk meningkatkan pemasaran garam lokal Bali yang mana Pemerintahan Provinsi Bali sudah mengedarkan Surat Edaran No. 17 tahun 2021 yang mengenai pemakaian produk garam tradisional untuk local Bali, dijadikan suatu perwujudan yang secara nyata dalam memihaknya serta suatu komitmen yang diberikan kepada sumber daya local melalui mengikuti peran yang secara aktif memberikan perlindungan, pelestarian, pemberdayaan serta memakai ataupun menggunakan produk garam tradisional local ini untuk salah satunya basis yang bisa mengembangkan ekonomi di Bali. Dengan keberadaan koperasi garam diyakini akan mampu meningkatkan pengemasan serta pemasaran garam lokal Bali (Kusmiati et al. 2018). Keberadaan koperasi garam sendiri masih terbilang langka, Hal tersebut didukung oleh data berikut koperasi garam yang sudah memiliki badan hukum di Bali.

Tabel 1. 1
Data Koperasi Garam di Provinsi bali

No	Nama Koperasi	No Badan Hukum	Kabupaten
1	Kop. Garam Bumi Putih Nusantara	002205/BH/M.KUKM.2/IX/2016	Buleleng
2	Kop. Garam tasik Segara Lestari	002200/BH/M.KUKM.2/IX/2016	Buleleng
3	Koperasi Pemasaran Krama bali Sejahtera Bali Mula	AHU-0000248.AH.01.26.TAHUN 2019	Buleleng
4	Koperasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Mping Garam Amed Bali	015191/BH/M.KUKM.2/IX/2019	Karangasem
5	Koperasi Lepp Mina Segara Dana	20/BH/DKPKM/XII/2004	Klungkung

(sumber: nik.depkop.go.id) data diolah

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan koperasi garam di bali masih langka, terlihat dari data tersebut terdapat lima koperasi garam yang sudah memiliki badan hukum. Kabupaten buleleng merupakan salah satu yang paling banyak pendirian koperasi garam, hal tersebut dikarenakan Buleleng mempunyai kemampuan pengolahan garam tradisional yang telah menyebar pada beberapa desa di kabupaten buleleng, sehingga keberadaan koperasi petani garam diyakini sangat mampu dapat meningkatkan perekonomian di masyarakat sekitarnya. Dengan adanya koperasi ini, akan memfasilitasi pemasaran produk garam tradisional lokal bali (Kusmiati et al. 2018). Namun, seiring dengan berdirinya koperasi petani garam di kabupaten Buleleng banyak sekali permasalahan yang dihadapi oleh para petani garam salah satunya adalah ketidakpahaman tentang perkoperasian, terutama dalam pembuatan laporan keuangan yang akan disampaikan dalam rapat anggota tahunan (RAT). Dilansir dalam berita (Nusabali 2021) pada tanggal 21 juli 2021, menyatakan bahwa pihak

Dinas Ketahanan Pangan serta Perikanan Buleleng menegaskan adanya kelemahan dari suatu koperasi yakni terletak pada Lembaga, usaha serta keuangannya. Melalui Lembaga yang masih belum mempergunakan IT, melalui usaha yakni seperti SDM yang masih kebanyakan lulusan SMA serta kebanyakan yang belum mendapat pelatihan melalui koperasi, dengan demikian yang tidak sulit untuk diadakan yakni simpan pinjaman. Kemampuan yang masing kurang terkait dengan pelaku koperasi didalam bidang penanganan usaha yang meliputi hambatan yang dihadapkan kepada koperasi yakni masih terdapat Pendidikan yang rendah serta pengalaman yang masih minim terkait dengan akuntansi (Ikhsan 2018). Melalui bagian keuangannya, pengurus ataupun anggota dari koperasi hanyalah mendapat pelaporan melalui kepengurusan yang tanpa mempunyai pemahaman akan pelaporan tersebut, dengan demikian dibutuhkan pendampingan dari pihak yang ahli dibidangnya.

Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Petani Garam “Tasik Segara Lestari”. koperasi Garam Tasik Segara Lestari merupakan koperasi petani garam yang sudah berbadan hukum berada di desa Les, kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng, Bali. Koperasi garam ini disahkan pada tanggal 25 juli 2016, dengan yang tercantum pada akta pendirian NOMOR: 002200/BH/M.KUKM.2/IX/2016, dimana yang termasuk pada anggota adalah kelompok petani garam tradisional yang ada di desa les dengan jumlah 23 anggota. Anggota koperasi ini merupakan para petani garam yang memiliki lahan, pembentukanya pun berbeda dari koperasi-koperasi lainnya dan untuk kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi di koperasi ini masih sangat minim. Kualitas sumber daya manusia, dan

pelatihan juga sangat berpengaruh terhadap diterapkannya standar akuntansi pada koperasi (Candra 2018).

Hal ini diungkapkan sendiri oleh Bapak I Nyoman Madiasa selaku ketua koperasi

“Yen di Koperasi driki (disini) yang menjadi anggota koperasi driki (disini) para petani garam sane ngelah (yang mempunyai) lahan di wilayah driki (disini) yang tujuannya hanya untuk menyimpan dan mengelola hasil menjual garam pada musim panas. Proses produksi garam driki (disini) masih nganggon (menggunakan) cara lawasan (cara tradisional). Proses produksi hanya mengandalkan sinar matahari, untuk musim hujan ten ngidaang (tidak bisa) memproduksi garam. Anggota koperasi driki (disini) maupun pengurus ten ade (tidak ada) yang paham gati (sekali) akuntansi sawireh (karena) rata-rata menempuh pendidikan SD, SMP hanya bendaharanya saja sampai S1, hal tersebut sawireh (karena) latar belakang kami hanya dadi (menjadi) petani. Untuk pengelolaan uang ring (di) koperasi driki (disini) tiyang (saya) serahkan ke bendahara sawireh ten ade bise (tidak ada bisa) mengerti membuat laporan keuangan” (Bapak Nyoman Madiasa, 20 Januari 2022, pukul 11.00 WITA).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa di koperasi petani garam tasik segara lestari, kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi yang masih sangat minim menyebabkan koperasi tersebut belum bisa berkembang saat ini. hal tersebut dapat dilihat dari jumlah anggotanya yang belum ada perubahan. Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk koperasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut (Aulia dan Hamdani 2019), kualitas koperasi yang bagus salah satunya bisa diamati melalui kualitas pelaporannya. Factor yang mempunyai ketidaksesuaian dengan latar belakang pendidikan serta pelatihan yang kurang ialah suatu penyebab adanya kegiatan pengungkapan laporan yang masih dijadikan hambatan atau kendala (Toufiq dan Muhamad 2021). Koperasi garam “Tasik Segara Lestari” telah mengalami peningkatan yang cukup baik, tetapi belum secara maksimal dilihat dari jumlah aset yang dimiliki semakin

bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut digambarkan melalui tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 1. 2

Data Jumlah aset dan modal tahun 2017-2021

Tahun	Aset	Modal
2017	Rp. 23.475.498,00	Rp. 20.255.498,00
2018	Rp. 29.585.498,00	Rp. 22.180.649,00
2019	Rp. 36.100.498,00	Rp. 28.282.649,00
2020	Rp. 35.147.198,00	Rp. 28.805.149,00
2021	Rp. 43.260.686,00	Rp. 37.009.149,00

(sumber: Neraca Koperasi garam “Tasik Segara Lestari”)

Berdasarkan tabel data diatas tersebut menunjukkan bahwa eksistensi koperasi garam “Tasik Segara Lestari” di mata masyarakat masih tergolong baik, dilihat dari meningkatnya aset yang dimiliki, tetapi peningkatan tersebut masih tergolong minim, hal tersebut dikarenakan usaha menjual produk garam masih belum berjalan untuk beberapa tahun terakhir, produk garam yang dihasilkan para petani garam tersebut masih dijual secara individu di pasaran. Akan tetapi didalam menyajikan pelaporannya belum sesuai dengan standar SAK ETAP. Didalam penyusunan laporan, diharapkan suatu laporan mestu menyesuaikan dengan acuan atau format standar yang sudah ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Pelaporan keuangan pada koperasi tidak diharapkan menyesuaikan pada pelaporan atau pengungkapan yang masih berdasar pada SAK dengan basis IFRS penuh akan tetapi telah terdapat daftar didalam SAK ETAP yang bepedoman didalam *International Financial Reporting Standard for Small Medium Entities Size (IFRS for SMEs)* (Yuliza dan Afrijal 2016).

Adapun masalah yang ditemui pada Koperasi Garam “Tasik Segara Lestari” dalam penyusunan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan ketentuan

SAK ETAP. Pada laporan pertanggung jawaban yang disusun oleh koperasi garam “Tasik Segara Lestari” yang disusun oleh koperasi berupa neraca, dan Laporan perhitungan laba rugi. Kemudian berlandaskan SAK ETAP pelaporan keuangan meliputi neraca, perhitungan atas hasil dari sebuah usaha, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas serta CALK (Ikhsan 2018). Sehingga seharusnya laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi garam “Tasik Segara Lestari” dilengkapi dengan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam hal penyajian laporan keuangan koperasi, ada beberapa prinsip dasar akuntansi yang harus dipenuhi, dan ada juga regulasi yang harus dipatuhi untuk penyajian laporan keuangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah bahwa laporan keuangan koperasi harus disajikan sesuai dengan SAK ETAP (Fitra 2020). Dampak dari tidak diterapkannya SAK ETAP menyebabkan penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dan tidak bisa dicari tahu terkait dengan informasi yang diperlukan bagi pihak yang membutuhkan berita kepada pelaporan atas kinerja keuangannya yang masih belum diungkapkan itu.

Pengelolaan keuangan koperasi berbasis SAK ETAP penting dilakukan karena koperasi dituntut untuk memberikan informasi melalui pelaporan keuangan yang terpercaya dalam hal ini sesuai dengan SAK ETAP. Pengadaan standar akuntansi serta pemaparan laporan keuangan koperasi mempunyai tujuan memberi informasi akan suatu hal ke pihak anggotanya ataupun warga yang berkaitan dengan keadaan, kinerja serta perubahan letak keuangan yang mempunyai manfaat untuk penentuan kebijakan yang secara startegis guna melakukan atau mengembangkan suatu koperasi (Aulia dan Hamdani 2019). Jadi

laporan keuangan koperasi yang sesuai dengan SAK ETAP mencerminkan adanya akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan koperasi.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dicantumkan mengenai topik pengelolaan keuangan berbasis SAK ETAP yang diangkat serta digunakan sebagai pertimbangan. penelitian (Candra 2018) yang berjudul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK ETAP Pada Kpn Serumpun Dinas pendidikan Kabupaten Rejang Lebong. Mengemukakan bahwa pada koperasi tersebut didalam menyajikan pelaporan keuangannya masih ada ketidaksesuaian akan kaidah atau pedoman dalam menyajikan laporannya berdasar SAK ETAP. Beberapa hal yang mengakibatkan koperasi ini emmpunyai hal yang masih kurang didalam oenyajian pelaporan keuangan didasarkan pada SAK ETAP ialah dikarenakan masih minim adanya sebuah pengetahuan terkait dengan SAK ETAP serta kesadaran yang masih kurang juga oleh suatu manajemen terhadap laporan keuangan yang amat penting.

Sementara penelitian (Ikhsan 2018) yang berjudul Analisa dalam menerapkan SAK ETAP didalam Menyusun laporan didalam koperasi simpan pinjam atas cabang pinrang menyatakan bahwa menerapkan SAK ETAP di KSP yang dikarenakan cabang pinrang. Sudah terlaksana, akan tetapi masih kurangnya keefektifan karen hanyalah melakukan penerapan serta mengerjakan laporan kegiatan neraca serta hanya laba rugi saja. Kemudian kegiatan ruangan lingkup terkait dengan pelaporan keuangan SAK ETAP yakni meliputi beberapa hal misalnya neraca, laporan laba rugi, prubahan ekuitas, arus kas serta CALK yang tidak dibuat serta disesuaikan atas pedoman SAK ETAP. Penelitian (Rahmany 2019) yang berjudul Penerapan SAK ETAP Pada Laporan Keuangan Koperasi

(Studi Kasus Pada KPRI Di Kabupaten Sumenep). Menegaskan bahwasannya KPRI di Sumenep telah mengadakan catatan akuntansi serta melakukan penyusunan laporan dengan diadakannya pencatatan yang sederhana serta tidak berpedoman dalam standar akuntansi yang diberlakukan atau yang menguasai SAK ETAP tersebut.

Dari penelitian terdahulu dapat diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan berbasis SAK ETAP pada koperasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitiannya, penelitian ini dilakukan pada koperasi produsen petani garam yang masih dalam proses pengembangan. Dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi pada koperasi petani garam tasik segara lestari adalah dalam pengelolaan keuangan, yang dimana pada koperasi tersebut, dalam laporan pertanggungjawaban masih menggunakan dua laporan yaitu neraca singkat dan laporan laba rugi yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan standar keuangan koperasi SAK ETAP. Koperasi sebagai entitas publik harus membuat laporan keuangan menurut SAK ETAP (Fitra 2020). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis laporan keuangan koperasi garam “Tasik Segara Lestari” yang hanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan Ikhtisar perubahan kekayaan bersih, serta akan menyesuaikan laporan keuangan yang belum lengkap sehingga penelitian ini akan memberikan manfaat untuk koperasi.

Alasan peneliti tertarik melakukan penelitian di koperasi petani garam tasik segara lestari desa les karena, dalam (Sukasih Brata Winangun 2021) dilansir dari berita online kabupaten Buleleng tanggal 4 Maret 2021 menyatakan bahwa Desa Les juga dinyatakan sebagai salah satunya desa yang tergolong

kedalam program Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagperinkop-UKM), Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMDPTSP), Loka POM, dan Dinas Kesehatan tahun ini akan membentuk 5 Sentra Pangan dan penghasil garam yang berada di desa Les. Dengan keberadaan Koperasi garam ini menjadi salah satu wadah bagi petani garam dalam menyimpan dan pengelolaan keuangan hasil penjualan garam. Penelitian ini sangat penting dilakukan karena dilihat dari segi kualitas koperasi, Koperasi tasik segara lestari apabila bisa menjalankan usahanya secara maksimal maka akan menjadi prospek yang bagus untuk meningkatkan perekonomian secara nasional. Untuk menjadi koperasi yang bagus dan sehat salah satunya adalah memiliki laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar yang berlaku. Untuk itu dari segi kualitas laporan keuangan harus ditinjau kembali, agar pihak internal maupun eksternal dapat mengetahui kondisi koperasi dilihat dari kualitas laporan keuangan sesuai dengan SAK ETAP (Vebiyanti 2016). Hal tersebut akan memudahkan koperasi garam untuk mendapatkan permodalan dari pemerintah maupun Lembaga perbankan.

Dari pemaparan mengenai koperasi petani garam tasik segara lestari Desa Les kecamatan Tejakula, kabupaten Buleleng tersebut, peneliti ingin mengadakan riset yang berkaitan dengan judul yang ditentukan yakni” **Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntan Publik (SAK ETAP) Pada Pencatatan Laporan Keuangan Koperasi Petani Garam “Tasik Segara Lestari Desa Les”**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Mengacu pada pemaparan masalah yang disajikan didalam latar belakang tersebut, dengan demikian dapat diidentifikasi permasalahan yang ada didalam penulisan ini yakni:

- 1) Tiap koperasi yang tidak mempunyai akuntabilitas public, diharapkan pada setiap pelaporan keuangannya berpedoman dalam SAK ETAP.
- 2) Dalam pengelolaan keuangan, pada koperasi garam Tasik Segara Lestari, masihn belum mengadakan pembuatan pelaporan keuangannya yang disesuaikan pada acuan keuangannya, dikarenakan pengurus koperasi tersebut tidak mempunyai latar belakang Pendidikan akuntansi.
- 3) Ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan keuangan koperasi Garam “Tasik Segara Lestari” menurut SAK ETAP
- 4) Koperasi garam “Tasik Segara lestari” hanyalah melakukan penyusunan pelaporan keuangannya berupa neraca, Laporan Laba rugi, dan ikhtisar perubahan kekayaan bersih.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada pengidentifikasian permasalahan diatas, tidaklah keseluruhan masalah yang nantinya akan dikaji. Dengan demikian dibutuhkan suatu Batasan permasalahan supaya nantinya kajian bisa lebih memfokus serta lebih rinci akan satu topik yang difokuskan. Riset ini nantinya membatasi masalah berkaitan dengan pengetahuan akuntansi dan pengimplementasian standar akuntansi keuangan entitats tanpa akuntabilitas publik (SAK-ETAP)

mengkhususkan didalam pelaporan keuangannya petani garam tasik segara lestari, Desa Les, Kecamatan tejakula, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan masalah

Didalam riset ini telah ditentukan beberapa perumusan masalah yakni seperti berikut ini:

- 1) Mengapa Koperasi garam tasik segara lestari belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya?
- 2) Bagaimanakah implementasi melalui menerapkan Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) didalam menyajikan pelaporan keuangann Koperasi petani garam tasik segara lestari?
- 3) Apa kendala yang dihadapi pengurus koperasi garam “tasik segara lestari” ketika melakukan penyusunan pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP?

1.5 Tujuan Penelitian

Beberapa rumusan untuk sasaran yang ingin dicapai dalam kajian ini, yakni sebagai berikut:

- 1) Guna mencari tahu mengapa Koperasi garam tasik segara lestari belum sepenuhnya menerapkan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya
- 2) Guna mencari tahu hasil melalui dilakukannya implementasi atau menerapkan Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik

(SAK ETAP) pada penyajian laporan keuangan Koperasi petani garam tasik segara lestari

- 3) Untuk mengetahui hambatan maupun rintangan bagi koperasi ketika melakukan penyusunan pelaporan keuangan berbasis SAK ETAP.

1.6 Manfaat Penelitian

Berkaitan dengan manfaat yang ingin diberikan kepada beberapa pihak, telah diuraikan dibawah ini meliputi:

1) Manfaat Teoritis

Riset ini memberi sumbangan didalam melakukan pengembangan yang berkaitan dengan riset atau kajian ini serta bisa dijadikan sebagai suatu kajian yang mendasar untuk riset berikutnya khususnya perkembangan koperasi dalam memaksimalkan pemahaman di bidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang disesuaikan pada SAK ETAP disuatu perkoperasian.

2) Manfaat praktis

a) Bagi Penulis

Penulis dapat mendapat tambahan imlu maupun wawasan dalam penerapan imlu berkaitan dengan akuntansi yang secara khusus didala kajian ini yakni berhubungan dengan implementasi SAK ETAP didalam pengerjaan laporan keuangan.

b) Bagi pengurus koperasi

Riset ini bisa memberi pengertian terkait dengan pentingnya standar akuntansi keuangan SAK ETAP pada koperasi. Penelitian ini memberi juga terkait dengan ilmu wawasan maupoun pengetahuan ke pihak pengurus Lembaga

koperasi yang berkaitan akan pentingnya sebuah system pengerjaan akuntansi serta Menyusun laporan yang lebih sesuai dengan pedoman yang ditetapkan sehingga nanti penyajiannya bisa lebih akurat dan lengkap dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

c) Bagi Universitas Pendidikan ganesha

Simpulan riset yang diperoleh nantinya diharap bisa memberikan wawasan yang bertambah dan juga bisa dimanfaatkan untuk tambhaan informasi kepada peneliti berikutnya ketika mengadakan kajian terkait akuntansi perkoperasian berbasis SAK ETAP lebih lanjut.

